

BAB II

LATAR BELAKANG PEMEKARAN KABUPATEN BENGKAYANG PADA TAHUN 1999

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000.

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini di anggap kurang tepat bila tidak ada perbandingan yang setara. Disamping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dengan daerah otonomi baru sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi dikedua daerah otonomi baru sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi dikedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah otonomi baru, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Perbandingan perkembangan pemekaran wilayah dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu:

1. Kinerja perekonomian daerah;
2. Kinerja keuangan daerah;
3. Kinerja pelayanan publik;
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada, agar

dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan dikembalikan pada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retrebusi, juga kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya (Kabupaten Bengkayang Dalam Tri Astuti 2006: 41).

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang sebesar 5.396,30 km² atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2009, Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 Kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing Kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah kecamatan capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Bengkayang, Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang Pada tahun 2009 adalah sebesar 209.927 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 106.458 jiwa sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 103.469 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin Kabupaten Bengkayang pada tahun 2009 adalah 103. Angka ini berarti jika ada 103 penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan. jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Monterado sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang. Namun demikian, dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Sungai Raya memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi, yaitu sebesar 265 jiwa

perkilometer persegi sedangkan Kecamatan Jagoi Babang memiliki tingkat kepadatan paling rendah, yaitu sebesar 11 jiwa perkilometer persegi. Penduduk Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kelompok usia muda. Hal ini dari masih banyaknya penduduk yang masuk dalam kelompok usia muda (dibawah 20 tahun) yaitu sebesar 47,46 persen (Kabupaten Bengkayang tahun 2010 dalam Tri Astuti, 2006: 44-45).

Kabupaten Bengkayang didominasi oleh Suku Dayak (Dayak Bekati dan Dayak Ahe) yang menempati wilayah pegunungan, etnis Melayu yang berada di wilayah pesisir dan etnis Tionghoa berbahasa Tionghoa yang menempati wilayah perkotaan serta etnis pendatang yang rata-rata berasal dari Jawa tinggal di wilayah transmigrasi/paket. Kecamatan Sungai Raya didominasi oleh suku Melayu Pontianak dengan bahasa Melayu berdialek Pontianak. Sedangkan penduduk asli di pedalaman adalah Suku Dayak dengan bahasa dayaknya. Selain itu juga terdapat masyarakat dari etnis Tionghoa dengan bahasa yang sehari-hari digunakan adalah bahasa Cina, dan Suku Bugis. Penduduk Kecamatan Bengkayang menganut kepercayaan Katholik Roma, Kristen Protestan, Islam, Buddha, Hindu dan Aliran Kepercayaan yang masih dipercaya oleh Adat Istiadat setempat. Penduduk Kecamatan Sungai Raya sebagian besar beragama Islam, disamping agama Hindu, Katholik, Protestan, Budha dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan Melayu yang banyak dipengaruhi oleh agama Islam.

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkayang berdasarkan agama yang dianut yaitu; Agama Islam : 78, 347 Jiwa, Kristen : 57, 072 Jiwa, Katolik : 66, 278 Jiwa, Hindu : 230 Jiwa, Budha : 10, 969 Jiwa, Khong hu chu : 2, 265 Jiwa. Total penduduk di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2010 berjumlah 215, 277 jiwa (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: 2010).

Berdasarkan wawancara dengan Yohanes Atet, S. Sos, M. Si, bahwa:

Wilayah Kabupaten Sambas merupakan Wilayah yang cakupannya sangat luas dari sambas sampai ke Singkawang dan untuk daerah Bengkayang wilayahnya sampai ke Seluas, Jagoi Babang bahkan sampai ke Sungkung sampai ada yang berbatasan dengan Landak dan Sanggau Kapuas dengan demikian cakupan sangat luas dengan jumlah kecamatan kurang lebih 27 kecamatan ketika itu. Dengan adanya pembangunan pasti terhambat dan tidak bisa berjalan dengan cepat, sedangkan tujuan pemekaran itu sendiri mempercepat pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hal inilah yang menjadi faktor pendukung dan pendorong yang di ajukan kepada pemerintah dan kemudian dilanjutkan ke pemerintah provinsi dengan tahapan melalui pemerintah kabupaten diteruskan ke pemerintah provinsi dan kemudian diteruskan ke pemerintah pusat tahapan-tahapan itu juga terdapat putusan Bupati Sambas dan DPRD Sambas, Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Kalimantan Barat sehingga bisa diteruskan ke pemerintahan pusat (Kementerian Dalam Negeri).

Berdasarkan hasil wawancara di atas , luas wilayah sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pembangunan. Senada dengan itu Yakobus Niron Karoyo SH, usia 55 tahun, selaku tokoh pemuda ketika itu mengatakan:

Setelah masuk ke masa reformasi ada peluang daerah dengan adanya pemerintahan otonomi sehingga peluang mengusulkan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan daerah terutama daerah yang luas wilayahnya, khusus di Kalimantan Barat terutama di Bengkayang. Serta yang menjadi tolak ukur Pemekaran Bengkayang pada saat itu adalah luas wilayah, jumlah penduduk dan pendapatan asil daerah atau PAD. Selama bergabung dengan Kabupaten Sambas masyarakat di daerah pedalaman masih banyak yang tidak terjangkau oleh pemerintah dan pembangunan di daerah pegunungan masih sangat kurang dan hampir tidak ada, pembangunan hanya di prioritaskan di daerah pantai, adapun yang dibangun hanya sekedar fasilitas pemerintahan salah satunya perkantoran unit pelayanan teknis (UPT). Jadi motivasinya ingin membangun daerah supaya sama dengan daerah-daerah lain. Daerah-daerah seperti pegunungan, pedesaan dan pedalaman di daerah Bengkayang pada saat itu masih sangat miskin dan tertinggal.

Berdasarkan wawancara di atas , bahwa luas wilayah memang menjadi pertimbangan pemerintah untuk merealisasikan pemekaran tersebut, sehingga timbulnya ide atau gagasan untuk memekarkan Bengkayang menjadi sebuah Kabupaten, hal senada diaungkan oleh Drs. Jacobus Luna, M. Si usia 77 Tahun selaku Bupati pertama Kabupaten Bengkayang mengatakan bahwa:

Pada saat itu memang Bengkayang masih sangat jauh di bandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya terutama didalam bidang pendidikan dan kesehatan serta daerah-daerah yang ada di kecamatan masih terisolir dan susah untuk di jangkau. Wilayah Bengkayang yang sangat luas menyebabkan Jejang kendali terlalu sulit dan terbatas untuk di jangkau, fasilitas sarana dan prasarana masih sangat kurang. Oleh karena itu Masyarakat pada saat itu sangat mendukung dan sangat mengharapkan pembangunan karena saya juga pernah merasakan bagaimana sulitnya ketika itu seperti untuk sekolah saja saya harus berjuang. Untuk sekolah orang yang berasal dari pedalaman atau pelosok harus pergi ke kota untuk bersekolah maka dari itu masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat Bengkayang pada saat itu adalah pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas masih sangat kurang, pembangunan yang dilakukan juga hampir tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Bengkayang karena pada saat itu pembangunan hanya diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di pesisir, kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Selain itu luas wilayah juga menjadi permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pemerintah dan masyarakat Bengkayang untuk memekarkan Bengkayang menjadi sebuah Kabupaten, karena dengan wilayah yang sangat luas pemerintah kesulitan untuk menjangkau dan memperhatikan daerah-daerah yang terletak pedalaman khususnya di daerah Bengkayang dan sebaliknya masyarakat juga merasa kesulitan untuk berurusan dengan pemerintah karena jarak tempuh yang cukup jauh dan memerlukan biaya lebih jika harus ke Sambas. Karena beberapa permasalahan inilah sehingga masyarakat dan pemerintah saling membantu untuk merealisasikan Pemekaran Kabupaten Sambas sehingga terbentuknya Kabupaten Bengkayang.